

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karet merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia, terutama kontribusinya sebagai sumber penghasilan utama petani, penyedia lapangan kerja, penghasil devisa negara, mendukung pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan. Perkebunan karet di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan pada tahun 2017 areal perkebunan karet Indonesia tercatat seluas 3.672.123 ha. Perkebunan karet tersebut sebagian besar (3.115.703 ha) dikelola oleh rakyat, perkebunan besar Negara sebesar 230.882 ha serta perkebunan besar swasta sebesar 325.538 ha. Luas lahan meningkat tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah karet alam (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). Selain rendahnya produktivitas, masalah lain yang dihadapi saat ini diantaranya adalah tingginya harga pokok produksi dan rendahnya harga jual karet sehingga tidak memberikan nilai positif secara ekonomi. Nilai ekspor tahun 2017 sebesar 6.023.295.600 US\$ dengan volume ekspor 2.283.153,8 ton. Produksi dunia diperkirakan laju pertumbuhannya 2,5% pertahun dan perdagangan dunia tumbuh 2,6% (BPS, 2017).

Lahan karet yang luas di Indonesia tidak diimbangi dengan pengelolaan yang memadai. Sementara kebanyakan perkebunan karet milik rakyat dikelola seadanya, bahkan ada yang tidak dirawat dan hanya mengandalkan pertumbuhan alami. Akibatnya, produktivitas karet menjadi rendah. Bahkan produksi karet alam Indonesia tiap tahunnya berada di bawah Malaysia dan Thailand (Tim Penebar Swadaya, 2008).

Kadar karet kering sangat penting dengan digunakan untuk pedoman penentuan harga juga merupakan standar dalam pemberian bahan kimia untuk pengolahan *Ribbed Smoked Sheet* (RSS). Juliasari, dan Fathurakhman, (2014) menyatakan bahwa kadar keret kering (KKK) merupakan salah satu data yang diperlukan untuk menghitung asam formiat dalam proses penggumpalan. Kadar

keret kering (KKK) merupakan salah satu unsur menentukan kualitas mutu produk karet yang dihasilkan.

Kadar karet kering (KKK) atau yang dikenal K3 adalah partikel karet atau kandungan karet yang terdapat dalam lateks sehingga apabila lateks telah hilang kadar airnya maka terbentuk gumpalan dari partikel karet tersebut. Kadar karet kering merupakan salah satu parameter vital dan sangat penting di perkebunan karet, karena produktivitas kebun, harga jual atau premi yang di terima sangat bergantung kepada kadar karet kering (Rukmana, 2018) Lateks adalah getah seperti susu dari banyak tumbuhan yang membeku ketika terkena udara. Ini merupakan emulsi kompleks yang mengandung protein, alkaloid, pati, gula, minyak, tannin, dan resin. Lateks diperoleh dari menyadap tanaman.

Pelaksanaan penyadapan pada tanaman karet secara konvensional dilakukan dengan cara sadap bawah (cara tarik) dan sadap atas (cara sogrok). Sadap bawah diterapkan pada tanaman karet menghasilkan (TM) sampai dengan 14 tahun yaitu ketika menyadap kulit perawan (bark original / B0) tahun 1 - 8 pada panel 1 (B0-1) dan panel 2 (B0-2) dan pada tahun ke 9 - 14 pada panel (B1-1) Dan (B1-2). Sadap atas tahun paada tahun ke 15 – 19 dilakukan penyadapan $\frac{1}{2}$ S ke arah atas pada panel H0-1 dan H0-2, tahun ke 22 - 24 dan tahun ke 20 penyadapan bebas di panel H0-2.1(Karyudi dan Munthe, 2006).

1.2 Tujuan

Tujuan dalam penulisan laporan ini untuk memahami produksi dan kadar karet kering latek pada sadap atas dan bawah.

1.3 Kontribusi

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi informasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

II. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Perkebunan Musilandas semula adalah milik perusahaan bangsa Belanda yang bernama “INTERNATIO”. Didirikan pada tahun 1957, pada zaman Trikora ketika terjadi konflik Irian Barat. Semua perkebunan milik pemerintah Belanda diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Perkebunan Swasta tetap dimiliki pemiliknya, seperti pada masa penjajahan Belanda.

Setelah pemerintah dapat mengusir Belanda dari Irian Barat dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 86 tahun 1958 semua perusahaan perkebunan milik Belanda tersebut di nasionalisasikan menjadi perusahaan perkebunan milik pemerintah yang berada di bawah naungan Badan Pimpinan Umum Perusahaanan Perkebunan Negara (BPUPPN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959. Perkebunan-perkebunan yang diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut dikelompokkan menjadi satu, yaitu dengan terbentuknya Perusahaan Perkebunan Negara Baru (PPN Baru). Pada tahun 1963 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 PPN Baru Wilayah Lampung dan PPN Baru Cabang Sumatra Selatan termasuk Unit Musilandas menjadi satu dibawah naungan PPN Karet IX yang kantor pusatnya berkedudukan di Tanjung Karang.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1968 PPN karet diorganisir sehingga berubah menjadi Perusahaan Negara Perkebunan X (PNP X) yaitu didirikan pada tanggal 13 April 1968. Pada tanggal 01 Juli 1980 berdasarkan akte notaris G.A.S. Loban Tobing, S.H. No 53 Perusahaan Negara Perkebunan X berubah menjadi PT Perkebunan X (Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 1996, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII dilebur menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang berlaku sampai dengan tahun 2014 (PT Perkebunan Nusantara X (Persero), 1993). Setelah itu 90% saham pemerintah Indonesia di PTPN VII dialihkan ke PTPN III sebagai *holding* BUMN Perkebunan.

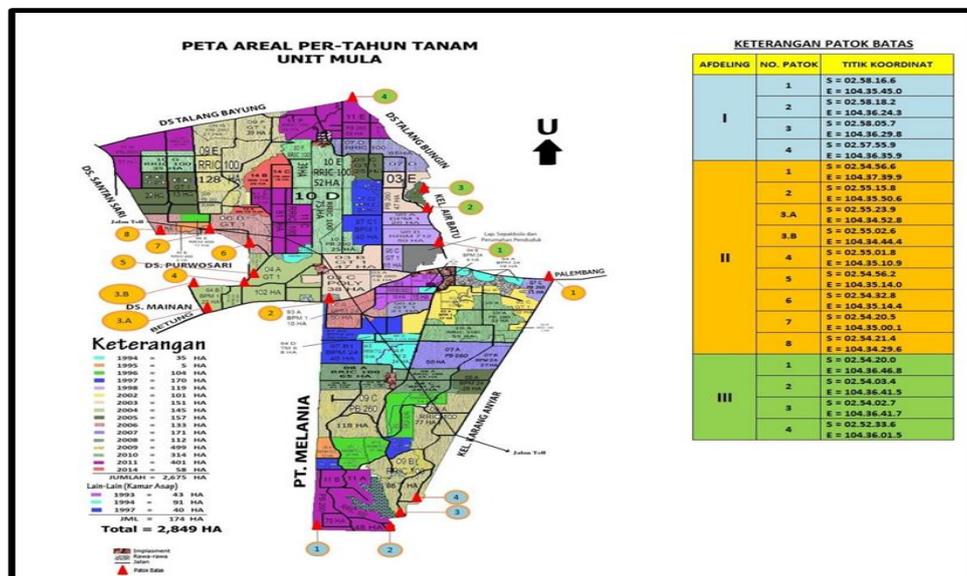
2.2 Letak Geografi Perusahaan

PTPN VII Unit Musilandas berlokasi di Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Jarak dari kota Palembang yaitu sekitar 20 km. (Profil PTPN VII Unit Musilandas, 2020).

PTPN VII Unit Musilandas memiliki luas wilayah 2.849 ha. Wilayah kerja perkebunan Unit Musilandas terbagi menjadi 5 bagian, yaitu: bagian administrasi, bagian pengolahan, dan 3 bagian lagi merupakan wilayah kebun yaitu, Afdeling I dengan luas lahan sekitar 749 ha, Afdeling II 843 ha, dan Afdeling III 875 ha. Setiap Afdeling dipimpin oleh seorang kepala kebun (Asisten Afdeling) (Profil PTPN VII Unit Musilandas, 2020). Yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Peta dan daerah yang berbatasan dengan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Musilandas antara lain :

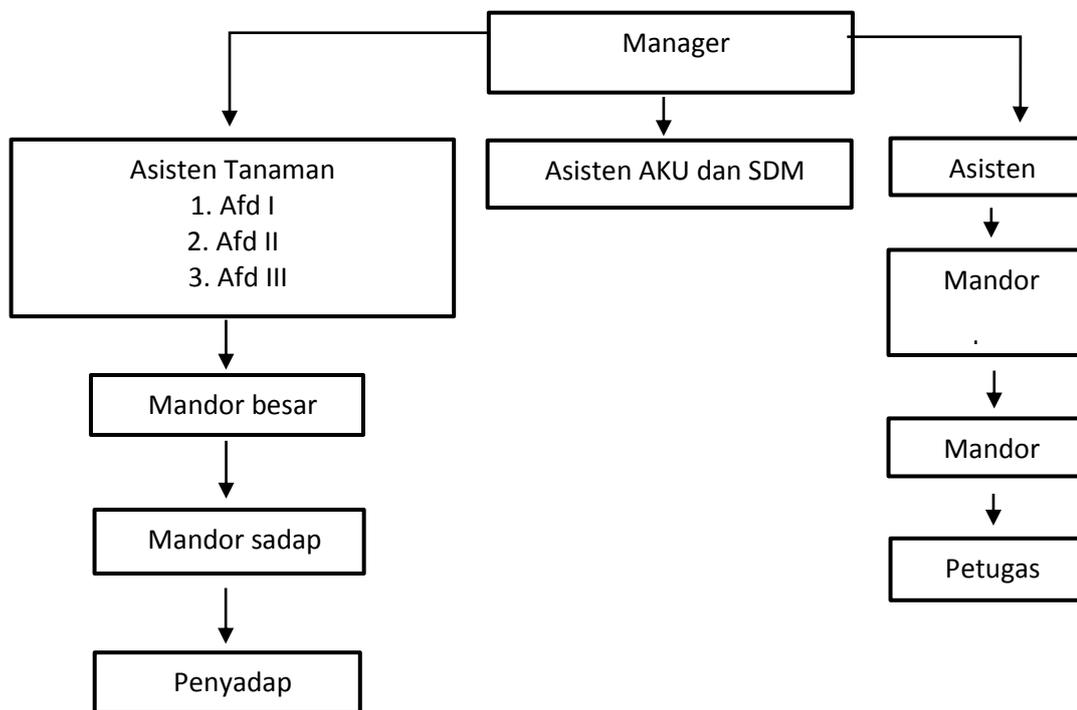
- Sebelah Utara : Dusun Talang Bungin, Desa Sungai Rengit
- Sebelah Selatan : Dusun Talang Kemang
- Sebelah Timur : Desa Karang Anyar
- Sebelah Barat : Desa Purwosari dan Desa Mainan



Gambar 1. Peta PTPN VII unit Musilandas.
Sumber. PTPN VII unit Musilandas, (2020).

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan alat yang digunakan untuk menentukan jabatan masing-masing orang yang tergabung dalam suatu perusahaan. PT Perkebunan Nusantara VII menggunakan struktur organisasi berbentuk diagram pohon, dimana jabatan tertinggi diduduki oleh manajer hingga ke bagian bawah dan diakhiri oleh para staf pada masing-masing bidang. Struktur organisasi ini berfungsi untuk menyelenggarakan pengelolaan terhadap perkebunan dan bertanggung jawab kepada direksi. Dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur organisasi PTPN VII unit Musilandas.
Sumber. PTPN VII Unit Musilandas, (2020).

Berdasarkan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Musilandas (2020), tugas pokok dan fungsi organisasi (Gambar 2) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manager

Mengelola dan mengamankan seluruh harta kekayaan perkebunan. Mengadakan pengawasan seluruh kegiatan dalam pengelolaan perkebunan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari kebijakan yang telah digariskan dan memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk digunakan

sebagai pedoman kerja setelah mendapat pengesahan dari direksi. Saat ini yang menjabat sebagai Manajer di PTPN VII Unit Musilandas adalah Heria Kusworo, S.P. Seorang manajer dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh asisten tanaman, asisten administrasi keuangan (AKU) dan sumber daya manusia (SDM), asisten teknik mekanisasi pengolahan (TMP), mabes, mandor, dan karyawan penyadap.

b. Asisten Tanaman

Asisten tanaman, bertugas membuat rencana penyadapan bulanan, membuat rencana target produksi, mengajukan kebutuhan peralatan sadap, membuat rencana penggunaan panel, menilai mutu sadap, menentukan kelas penyadap, dan membuat evaluasi produksi.

c. Asisten AKU dan SDM

Asisten AKU dan SDM, bertugas melaksanakan kebijakan yang meliputi bidang tanaman, teknik, administrasi keuangan, kesehatan, dan umum. Selain itu juga melaksanakan tugas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

d. Asisten Teknik dan Pengolahan

Asisten teknik dan pengolahan, bertugas mengawasi transportasi, perbaikan mesin, penggantian suku cadang, instalasi dan bangunan sipil dan pengolahan.

e. Mandor besar (Mabes)

Mabes mempunyai tugas dan tanggung jawab, seperti: meningkatkan mutu sadapan, menegakkan disiplin, pencapaian target produksi, dan mengawasi setiap kegiatan.

f. Mandor sadap

Mandor sadap, bertanggung jawab terhadap mutu sadapan anak buahnya, disiplin kerja, melaporkan kekurangan peralatan sadap dan penyakit, serta mutu hasil sadapan.

g. Karyawan penyadap

Karyawan penyadap, bertugas melaksanakan penyadapan karet menurut norma dan peraturan yang berlaku, menjaga mutu penyadapan agar tetap baik, meningkatkan produktivitas latek maupun *cup lump*, dan menjaga mutu hasil sadapan.

2.4 Visi, Misi dan Tujuan PTPN VII Unit Musilandas

Berdasarkan PTPN VII Unit Musilandas dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh perusahaan dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh perusahaan, visi, misi, dan tujuan PTPN VII Unit Musilandas adalah sebagai berikut:

Menjadi perusahaan agribisnis yang tangguh dengan tata kelola yang baik.

Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan.

1. Menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi untuk industri yang bermutu tinggi untuk pasar domestik dan pasar ekspor.
2. Mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata kelola usaha efektif guna menumbuhkembangkan perusahaan.
3. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis inti (karet, kelapa sawit, teh, dan tebu) dengan menggunakan teknologi terbaru.
4. Melakukan pengembangan bisnis berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan.
5. Memelihara keseimbangan kepentingan *stakeholders* untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Tujuan yang ingin dicapai PT Perkebunan Nusantara VII sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sector perkebunan sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh dalam skala usaha yang ekonomis.
2. Menjadi perusahaan yang berkemampuan (*profitable*), makmur (*wealth*) dan berkelanjutan (*sustainable*) sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional dan nasional.